
Strategi Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata Pasca Covid-19

Andi Setyo Pambudi¹, Muhammad Fikri Masteriarsa², Aditya Dwifebri Christian Wibowo³,
Imroatul Amaliyah⁴, dan Adhitya Kusuma Ardana⁵

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah meluas dan menyebar secara global tidak kurang dari 218 negara yang telah terparap termasuk Indonesia. Pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19. Pandemi ini memaksa negara melakukan pembatasan sosial serta pelarangan kunjungan wisatawan antar daerah maupun dari luar negeri. Dampak nyata yang terlihat adalah pekerja sektor ini mengalami penurunan penghasilan, khususnya yang terkait penyedia akomodasi dan makanan serta minuman; perdagangan besar dan eceran; reparasi motor dan mobil; serta pergudangan dan transportasi (BPS, 2020). Sebelum adanya pandemi, fokus pembangunan pada upaya dukungan peningkatan penguatan destinasi pariwisata prioritas (DPP) dan revitalisasi Destinasi Bali. Upaya saat ini tidak hanya terkait penanganan bencana, tetapi juga mengkaji ulang perencanaan nasional dan daerah untuk sektor pariwisata. Makalah ini bertujuan untuk melakukan analisis potret pariwisata Indonesia saat Pandemi Covid-19 dan memberikan rekomendasi *recovery* adaptasi kebijakan ekonomi, baik jangka pendek, maupun jangka menengah dan panjang. Metode yang digunakan adalah *literature review*, dengan pendekatan kualitatif terhadap kebijakan yang ada. Hasil analisis merekomendasikan bahwa kaji ulang perencanaan pembangunan pariwisata ditekankan pada stimulus umum, stimulus UMKM, penataan paket akomodasi, transportasi dan akses, stimulus perpajakan, bimbingan teknis, penguatan diversifikasi wisata, serta penguatan *demand* dan *supply side* pariwisata.

Kata kunci: Covid-19, Pariwisata, Kebijakan, Stimulus Ekonomi, *Recovery*

¹ Andi Setyo Pambudi Kepala Sub Direktorat di Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas. Email: andi.pambudi@bappenas.go.id

² Muhammad Fikri Masteriarsa adalah staf di Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas

³ Aditya Dwifebri Christian Wibowo adalah staf di Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas

⁴ Imroatul Amaliyah adalah staf di Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas

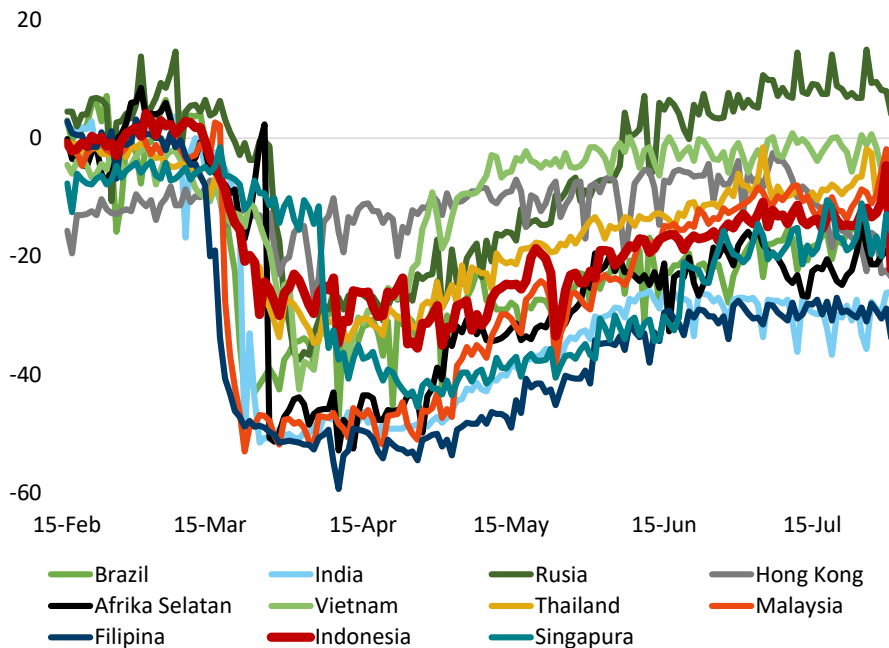
⁵ Adhitya Kusuma Ardana adalah staf di Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas

I. Pendahuluan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, Indonesia telah memprediksi bahwa risiko “ketidakpastian” masih akan berpengaruh signifikan pada perkembangan perekonomian Indonesia dan juga dunia. Berdasarkan data *World Economic Outlook Database IMF* yang dirilis pada Oktober 2019, perdagangan dunia dan pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan cenderung stagnan yang ditandai dengan tren melambat, dengan proyeksi sebesar 3,5 dan 3,7 persen per tahun sepanjang tahun 2020-2024. Pada awal 2020, dunia menghadapi pandemi Covid-19 yang berpengaruh sangat besar pada hampir semua aspek kehidupan manusia. Pandemi Covid-19 telah meluas dan menyebar secara global pada tidak kurang dari 218 negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan hal ini, International Monetary Fund (IMF) pada bulan Juni 2020 merubah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi tumbuh minus/negatif 4,9 persen (mengalami kontraksi) pada tahun 2020 ini. Angka ini lebih rendah 1,9 persen jika dibandingkan dengan proyeksi saat bulan April Tahun 2020 lalu yang memprediksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) global berkontraksi sekitar 3 persen.

Sebelum adanya Pandemi Covid-19, RPJMN 2020-2024 menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia akan dilaksanakan dengan 2 pendekatan utama, yaitu dalam bentuk pengelolaan sumber daya ekonomi, serta peningkatan nilai tambah ekonomi. Pendekatan-pendekatan ini adalah pijakan sinergi pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah. Keterpaduan sektor pangan dan pertanian, sektor kemaritiman, sektor industri pengolahan, sektor perikanan dan kelautan, sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta sektor ekonomi digital. Pada sektor pariwisata, konsep pendekatan ini mengalami perubahan yang cukup drastis. Pandemi ini memaksa negara melakukan pembatasan sosial serta pelarangan kunjungan wisatawan antar daerah maupun dari luar negeri. Jumlah kunjungan wisatawan luar negeri turun 59,96 persen selama bulan Januari–Juni Tahun 2020 jika dibandingkan periode bulan yang sama Tahun 2019. Saat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisatawan internasional ini hanya mencapai 3,09 juta kunjungan.

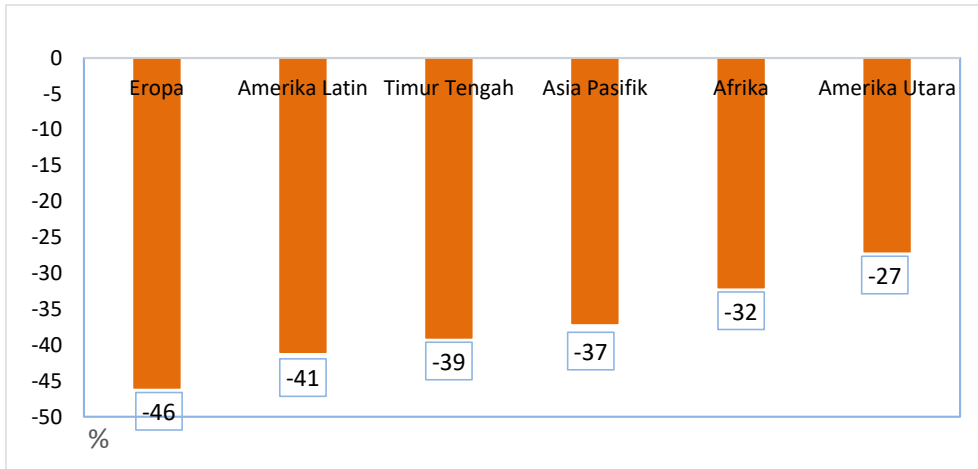
Pandemi Covid-19 berdampak pada mobilitas masyarakat di dunia dan juga Indonesia. Pembatasan sosial /*lockdown* pada April dan Mei menyebabkan turunnya mobilitas masyarakat. Sejak pertengahan Mei, sebagian negara mulai merelaksasi dan mobilitas masyarakat meningkat meski belum kembali sepenuhnya normal.



Gambar 1. Rata-rata Mobilitas Google- Deviasi terhadap Baseline Negara Berkembang (persen)

Sumber: Google Mobility Report (diolah), per 31 Juli 2020

Pandemi Covid-19 tidak hanya memukul sektor pariwisata yang ada Indonesia saja, namun juga pada skala global dimana pada berbagai belahan dunia terjadi penurunan tajam pada usaha jasa penerbangan, perhotelan, angkutan darat serta laut (CEIC, 2020). Industri travel dunia mengalami penurunan penghasilan yang cukup signifikan, baik di Eropa, Amerika Utara, Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan juga Asia Pasifik (Becker, 2020). Eropa terdampak paling besar dengan penurunan pemasukan sebesar minus 46% dan penurunan terkecil di Amerika Utara sebesar minus 27%. Sementara itu, menurut CEIC (2020), sektor-sektor ekonomi yang berhubungan dengan pariwisata diperkirakan akan terdampak pandemi Covid-19. Sektor-sektor ini antara lain adalah industri pengolahan, transportasi dan penyediaan akomodasi, makan-minum serta perdagangan skala besar dan juga eceran. Industri pengolahan mengalami dampak terkait pariwisata karena faktor disrupsi global *supply chain*. Sektor transportasi cukup nyata terdampak karena adanya pembatasan perjalanan yang diterapkan oleh pemerintah di hampir semua negara, begitu juga terkait sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum. Perdagangan skala besar maupun eceran terdampak dalam hal ini adalah akibat penerapan *physical distancing*.



Gambar 2. Persentase Perubahan *Revenue* Industri Travel Dunia Tahun 2019 ke 2020 (%)
Sumber: Becker, 2020 (diolah)

Di Indonesia, dampak nyata yang terlihat adalah pekerja sektor pariwisata mengalami penurunan penghasilan, khususnya yang terkait penyedia akomodasi dan makanan serta minuman; perdagangan skala besar dan eceran; reparasi mobil dan motor; serta pergudangan dan transportasi (BPS, 2020a). Pada bulan Februari Tahun 2020, jumlah penganggur di Indonesia selama awal pandemi Covid-19 adalah sebesar 6,88 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,99 persen (BPS, 2020a). Pada daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai pemasukan utamanya, sudah mulai muncul rasa pesimis pada masa depan sektor pariwisata, terutama bagi daerah yang sangat tergantung atau tertarik untuk mengembangkan pariwisata mengingat tidak adanya kepastian kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Sambodo (2020) menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata setidaknya berpengaruh secara risiko ekonomi dalam kaitannya dengan: 1) Penutupan Sementara Hotel, Restoran, Industri Pariwisata Lainnya; 2) Pengurangan Karyawan: Cuti Tidak Dibayar (*unpaid leave*)/ Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); 3) Kesulitan Likuiditas: Gagal Bayar Kredit Investasi dan Modal Kerja; serta 4) Penutupan Usaha secara Permanen.

Banyak penelitian telah dilakukan tentang kebijakan pariwisata internasional, namun sedikit penelitian telah dilakukan tentang bagaimana adaptasi kebijakan ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi pariwisata (Kim et al., 2016). Kaji ulang perencanaan pembangunan ekonomi tidak berarti merubah total perencanaan, tetapi menambahkan sebagian sesuai dengan kondisi yang ada saat ini dengan lebih fleksibel (Lew, 2014).

Makalah ini bertujuan untuk melakukan analisis potret pariwisata Indonesia saat Pandemi Covid-19 dan memberikan rekomendasi *recovery* adaptasi kebijakan ekonomi, baik jangka pendek, setahun pasca pandemi berakhir, maupun jangka menengah dan panjang. Makalah ini akan bermanfaat bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan karena dapat dijadikan masukan bagi pemerintah untuk memberikan skala prioritas adaptasi kebijakan pariwisata prioritas sesuai kondisi terkini berdasarkan studi literatur.

II. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Ekonomi dan Pembangunan Pariwisata

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan standar kehidupan pada sepanjang waktu tertentu bagi sebagian besar keluarga di suatu negara. Ekonomi yang tumbuh dapat bersumber dari naiknya pendapatan masyarakat yang memungkinkan orang dapat mengonsumsi dengan lebih banyak dan beragam (Mankiw, 2009). Meskipun demikian, kemajuan dan keberhasilan pembangunan itu bukanlah satu satunya indikator keberhasilan pembangunan (Todaro & Smith, 2006).

Dalam suatu perekonomian ada berbagai indikator untuk menilai kinerja keberlangsungan perekonomian, salah satunya adalah menggunakan pendekatan Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, PDB sendiri merupakan nilai pasar dari keseluruhan barang dan jasa akhir yang telah diproduksi oleh suatu negara pada suatu periode yang tertentu (Mankiw, 2006). Pada tingkat regional, jumlah seluruh *value added* dari barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian wilayah pada periode tertentu diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto atau dikenal dengan PDRB. Peningkatan *value added* dari suatu *input* (bahan baku) menjadi *output* (produk) menunjukkan adanya perkembangan pada perekonomian suatu wilayah.

Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata mendefinisikan pariwisata sebagai bermacam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan daerah. Menurut Mathieson & Wall (1982) permintaan pariwisata adalah jumlah orang yang bepergian atau ingin bepergian yang jauh dari lokasi kerja dan tempat tinggal untuk dapat menggunakan fasilitas dan layanan wisata.

Kegiatan pariwisata tidak lepas dari perdagangan internasional karena terkait dengan pertukaran barang atau jasa antara suatu negara dengan negara lain (Todaro & Smith, 2006). Perdagangan terjadi apabila salah satu pihak memperoleh keuntungan atau manfaat tetapi pihak lain tidak merasa dirugikan. Semua kegiatan tersebut dilakukan menyesuaikan interaksi antara wisatawan dan industri pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatanya, gambaran interaksi inilah yang digambarkan sebagai interaksi permintaan dan penawaran dalam pariwisata.

Dari sisi *demand*, pariwisata didefinisikan oleh UNWTO menjadi 3 kelompok yaitu : 1) *inbound tourism*, 2) *domestik tourism*, 3) *outbound tourism*. Pelaksanaan pariwisata akan menghasilkan devisa yaitu total pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh dan atau atas nama wisatawan dalam perjalanan wisatanya. Beberapa komponen permintaan dalam pariwisata diantaranya jumlah kunjungan wisatawan (*inbound* dan domestik), pengeluaran atau konsumsi wisatawan (*inbound*, *outbound* dan domestik), jumlah lama tinggal wisatawan. Komponen-komponen ini merupakan penggunaan barang/jasa yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pariwisata dan menghasilkan penerimaan negara (devisa).

Pariwisata jika dilihat dari *supply side* adalah usaha-usaha penyediaan barang atau jasa untuk memenuhi keperluan wisata atau penyelenggaraan sebuah wisata. Regulasi undang-undang kepariwisataan menjabarkan bahwa terdapat 13 jenis usaha wisata yaitu : 1) usaha kawasan pariwisata, 2) usaha daya tarik wisata, 3) usaha perjalanan wisata (biro dan agen perjalanan wisata), 4) usaha jasa transportasi wisata, 5) usaha jasa makanan-minuman, 6) usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, 7) usaha penyedia akomodasi, 8) usaha penyelenggaraan pertemuan, 9) usaha jasa informasi, 10) usaha jasa konsultasi pariwisata, 11) usaha wisata tirta, 12) usaha jasa pramuwisata, dan 13) usaha spa. Komponen *supply* ini adalah yang menjadikan daya tarik untuk berwisata baik itu wisata alam maupun wisata buatan, serta barang/ jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan.

2.2. Teori Stimulus Ekonomi : Intervensi Pemerintah

Dalam ekonomi klasik Adam Smith dijelaskan bahwa intervensi yang minim pada perekonomian negara membuat bisnis dapat berkembang dengan cepat. Dalam konsep perdagangan terdapat "*invisible hand*" yang membuat perekonomian secara alamiah akan kembali pada ekuilibrium (Smith, 1776). Namun pemikiran klasik ini masih terbatas dan belum menganalisis ketidakseimbangan yang terjadi akibat dari realitas ekonomi yang tidak ideal seperti penurunan permintaan secara tiba-tiba. Pada saat terjadi *Great Depression*, intervensi pemerintah dibolehkan ketika terjadi ketidaksempurnaan pada pasar bebas (Keynes, 2018). Selain itu intervensi pemerintah juga diperlukan lebih tegas karena kompetisi pasar hanya dapat terjadi jika pemerintah menjaminkannya. Maka keterlibatan pemerintah diperlukan untuk mempertemukan/ mengharmonisasikan antara tujuan dari publik dengan tujuan pasar.

Dalam teori ekonomi, stimulus ekonomi dibedakan menjadi 2, yaitu dalam bentuk stimulus kebijakan fiskal dan juga moneter (Setiawan, 2018). Kebijakan fiskal digunakan pemerintah melalui justifikasi pada sisi penerimaan dan belanja pemerintah dalam rangka pengelolaan perekonomian yang lebih baik (Maknkiw, 2013). Kebijakan fiskal dibedakan menjadi 2 (dua) instrumen utama, yaitu *functional finance* dan pendekatan pengelolaan *budget* (anggaran). Instrumen kebijakan *functional finance* dilakukan untuk mengendalikan anggaran belanja pemerintah dari berbagai macam dampak yang ditimbulkan secara tidak langsung terhadap pendapatan nasional suatu negara. Selain itu, instrumen ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Instrumen kebijakan pendekatan pengelolaan *budget* ditujukan dalam rangka mengatur jalannya anggaran pemerintah melalui hutang dan perpajakan.

Sebuah kebijakan fiskal mempengaruhi roda perekonomian karena terkait dengan peningkatan *expenditure* pemerintah atau dalam bentuk *tax cutting*. Aktivitas ekonomi ini memiliki *multiplier effect* dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga (Keynes, 2018). Pemotongan pajak dapat menaikkan *disposable income* yang bertujuan agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Besarnya *multiplier effect* dari peningkatan pengeluaran pemerintah dan pemotongan pajak tergantung pada

besarnya *marginal propensity to consume* yang bersifat transitory atau permanen. Sementara itu, kebijakan moneter adalah suatu kebijakan dimana otoritas moneter suatu negara mengendalikan pasokan uang, menargetkan tingkat suku bunga dalam rangka mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Tujuan utama dari kebijakan moneter antara lain, untuk mengatur stabilitas harga, stabilitas nilai tukar dan suku bunga, *full employment*, membaiknya pendapatan per kapita serta terkait keterbukaan pasar keuangan (Mishkin, 2010).

III. Metodologi

Penelitian Potret Sektor Pariwisata Indonesia dan Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 dilakukan dalam bentuk *policy review* berbasis data sekunder berupa kebijakan pembangunan serta laporan terkait pariwisata Indonesia yang diterbitkan BPS/Bappenas/Kementerian Keuangan/Kementerian Teknis terkait. Analisis kualitatif dilakukan untuk mendapatkan informasi gap permasalahan yang dihadapi sektor pariwisata selama sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 untuk sektor pariwisata. Cara ini digunakan untuk memetakan jenis masalah yang paling banyak menjadi atensi publik untuk sektor pariwisata selama pandemi Covid-19 sebagai basis memberikan rekomendasi adaptasi perencanaan pembangunan. Rekomendasi kebijakan jangka pendek, jangka 1 tahun setelah pandemi berakhir serta jangka menengah dan panjang terkait adaptasi terkait recovery ekonomi sektor pariwisata dipertimbangkan untuk mendongkrak 3 target penyerapan tenaga kerja, jumlah wisatawan dan jumlah penghasilan sebagaimana perencanaan awal pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

IV. Analisis dan Pembahasan

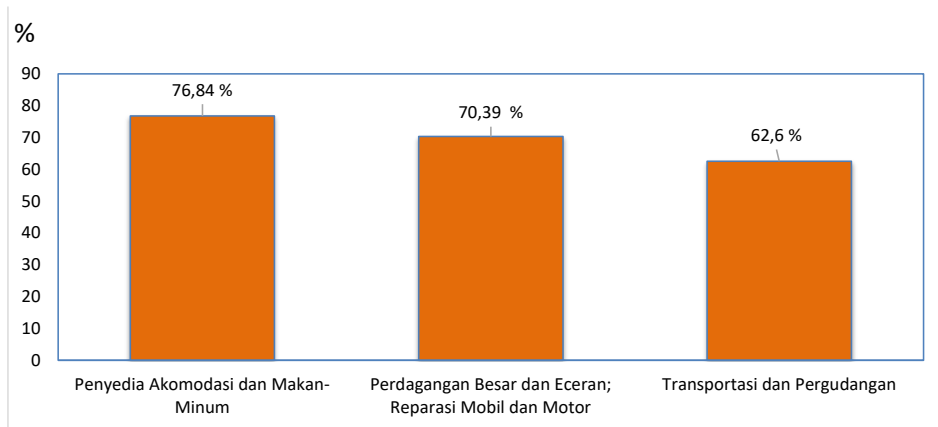
4.1. Kebijakan Pembangunan Pariwisata dalam RPJMN 2020-2024

Kawasan Asia-Pasifik adalah kawasan paling kompetitif kedua dalam hal wilayah regional paling kompetitif terkait pariwisata setelah Eropa- Eurasia (Calderwood & Soshkin, 2019). Asia-Pasifik termasuk Indonesia adalah wilayah menawarkan kombinasi terbaik antara budaya dengan alam, termasuk memiliki kinerja regional paling tinggi untuk subindex *culture source* dan *business travel*. Asia-Pasifik ditunjang oleh transportasi udara terbaik di dunia, khususnya dalam mendukung infrastruktur untuk layanan wisata.

Sektor pariwisata menyumbang kontribusi signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2018, terdapat 15,81 juta kunjungan wisatawan mancanegara dengan pertumbuhan sebesar 12,58% dan mampu menyumbang devisa sebesar USD 19,3 Miliar. Kontribusi sektor pariwisata mampu mengurangi tekanan pada neraca pembayaran di Indonesia yang tercatat mengalami defisit sebesar USD 7,1 Miliar pada tahun 2018, dan diproyeksikan dalam 5 tahun kedepan akan menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Pada tahun yang sama, terdapat 303,4 juta perjalanan wisatawan nusantara

dengan pertumbuhan 12,37%, disertai total pengeluaran wisatawan sebesar Rp291 triliun, dengan tingkat pertumbuhan belanja sebesar 17,9% (Kementerian Pariwisata, 2019).

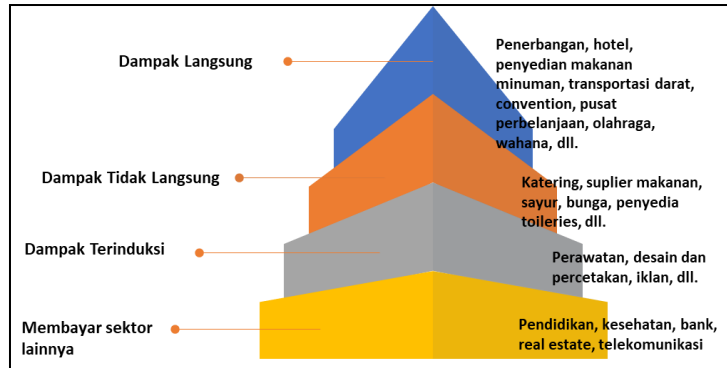
Pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 sepertinya akan merubah proyeksi 5 tahun tersebut mengingat sektor ini salah satu yang paling banyak tertekan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga dunia. Sebelum adanya pandemi, fokus pembangunan pada upaya dukungan peningkatan penguatan destinasi pariwisata prioritas (DPP) dan revitalisasi Destinasi Bali. Upaya saat ini tidak hanya terkait penanganan bencana, tetapi juga mengkaji ulang perencanaan nasional dan daerah untuk sektor pariwisata.



Gambar 3. Bagian Sektor Pariwisata di Indonesia yang Paling Terdampak Covid-19 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020b (diolah)

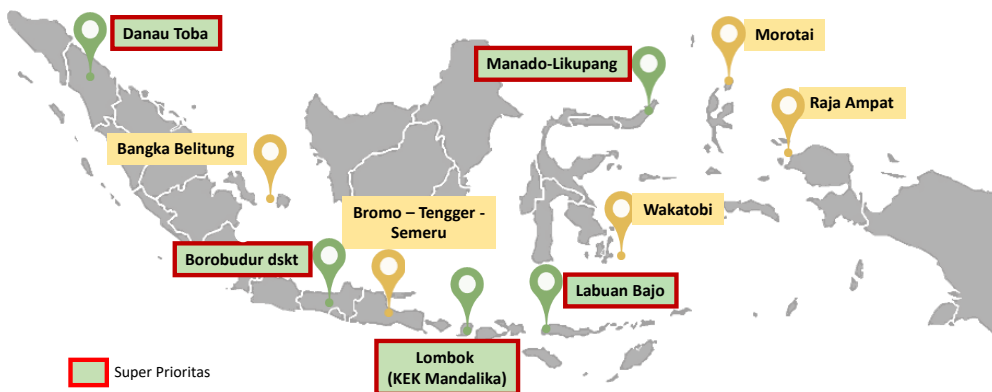
Dalam *Travel & Tourism Competitiveness Index* tahun 2019, dari 4 komponen penilaian, Indonesia memiliki keunggulan dalam komponen kebijakan dan kondisi pariwisata yakni menempati peringkat 4 dari 140 negara, dan komponen Sumber Daya Alam dan Budaya menempati peringkat 18 dari 140 negara (Calderwood & Soshkin, 2019). Sektor pariwisata mampu menyediakan 13,8 juta lapangan pekerjaan atau setara dengan 1 dari 9 pekerjaan yang ada di Indonesia. Selain memberikan dampak lapangan pekerjaan, pariwisata juga menciptakan dampak tidak langsung dan dampak induksi ke industry lainnya, termasuk ke UMKM. Tingginya kontribusi dan pertumbuhan sektor pariwisata menjadikan sektor ini sebagai sektor utama dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan valuta asing, mendorong industri pendukung lainnya, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mempromosikan keindahan alam dan budaya di Indonesia.



Gambar 3. Potret Keterkaitan Sektor Pariwisata dengan Sektor Lainnya

Sumber: BPS, Travel & Tourism Competitiveness Report, Kementerian Parekraf/Baparekraf (diolah, 2020)

Kontribusi Pariwisata di Indonesia masih bertumpu pada Provinsi Bali, dimana menyumbang sebesar 41% dari total kunjungan wisatawan mancanegara dan provinsi tujuan wisatawan nusantara peringkat 10 di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian nasional, pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 menetapkan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) atau disebut dengan 10 “*New Bali*” yang meliputi Danau Toba dan sekitarnya (Sumatera Utara), Candi Borobudur dan sekitarnya (Jawa Tengah), Lombok-Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Manado-Likupang (Sulawesi Utara), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Raja Ampat (Papua Barat), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Bangka Belitung, dan Morotai (Maluku Utara). Pengembangan 10 DPP tersebut dapat membuka peluang pengembangan destinasi yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal sekelas Bali.



Gambar 4. Lokasi 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Indonesia

Sumber: Sambodo, 2020

Kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata difokuskan pada pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dengan mengusung konsep pariwisata berkualitas yang ditunjukkan oleh peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan. Kebijakan ini didukung dengan penguatan aksesibilitas, atraksi dan amenitas, serta kualitas dari SDM

pariwisata pada 10 DPP sebagai destinasi pengungkit pertumbuhan pariwisata. Diversifikasi jenis pariwisata yang dilakukan mencakup wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan (*Meeting-Incentive-Convention-Exhibition/MICE*), wisata kebugaran/wellness tourism, wisata kesehatan/medical tourism, dan wisata olahraga). Sepanjang 2020-2024, 6 rincian proyek strategis yang menjadi *concern* dalam pembangunan 10 DPP kedepan, yaitu 1) Perintisan Destinasi Pariwisata, 2) Penanganan jalan mendukung 10 DPP, 3) Pengembangan pelabuhan dan bandara, 4) Pengembangan desa wisata dan fasilitas BUMDes, 5) Pembangunan amenitas Kawasan pariwisata, dan 6) Pembangunan dalam wilayah dan Kawasan.

4.2. Dampak Pandemi Covid-19 Semester I-2020

Pandemi Covid-19 mulai memasuki Indonesia pada awal bulan Maret dan masih berlangsung hingga 24 agustus 2020 mencapai 155 ribu kasus dengan jumlah pasien meninggal sebesar 6.759 jiwa. Peningkatan kasus yang masih terjadi menyebabkan fokus utama pemerintah ialah pemulihan pada kesehatan dengan kebijakan memutus rantai penyebaran Covid-19 melalui jaga jarak (*social distancing*) dan bekerja dari rumah (*work from home*). Kebijakan tersebut berdampak pada menurunnya aktivitas transportasi baik nasional maupun internasional, dan secara langsung berdampak pada berkurangnya aktivitas pariwisata di Indonesia.

Sepanjang semester 1 2020, jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia mengalami penurunan sebesar 59,7% dari yang semula 7,7 juta orang, menjadi 3,1 Juta orang (YoY). Disisi lain, aktivitas transportasi nasional mengalami penurunan baik melalui pesawat, kereta api, maupun kapal laut. Total kepergian nasional pada semester 1 2020 hanya menampung 136 juta penumpang, dimana pada periode yang sama ditahun sebelumnya mencapai 256 juta penumpang (YoY).

Penurunan kedatangan wisatawan asing dan perjalanan transportasi nasional berdampak pada subsektor penyediaan akomodasi, dimana tingkat penghunian kamar hotel berbintang (TPK) di Indonesia hanya 30% dari periode sebelumnya yang mencapai 51%. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) pada hotel berbintang di 10 destinasi pariwisata prioritas cenderung mengalami penurunan sejak Januari hingga Juni 2020. Tercatat level hunian terendah terjadi pada tingkat 6,23% dibulan April pada provinsi Nusa Tenggara Barat. Seluruh provinsi mengalami TPK terendah pada bulan April dan bulan Mei. Level terendah dibulan April dicatatkan oleh provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara. Sementara itu Provinsi Papua Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Kep. Bangka Belitung mengalai fase terendah pada bulan Mei. Walaupun demikian, semua provinsi mencatatkan kenaikan tingkat hunian kamar pada bulan Juni, dikarenakan mulai dilonggarkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dilakukan oleh tiap pemerintah daerah sehingga mulai mendorong kembali kenaikan tingkat hunian kamar di 10 provinsi tersebut.

Tabel 1. Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Berbintang (%)

Provinsi	2020					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Papua Barat	50.40	57.41	45.75	12.17	10.73	14.53
Maluku Utara	56.74	41.15	24.96	21.40	9.77	17.02
Sulawesi Tenggara	39.18	54.32	29.39	10.48	12.76	19.07
Sulawesi Utara	59.10	44.01	33.13	13.98	19.14	24.62
Nusa Tenggara Timur (NTT)	39.26	38.50	25.19	13.32	11.57	19.69
Nusa Tenggara Barat (NTB)	38.93	36.70	19.07	6.23	14.42	18.59
Jawa Tengah	41.51	46.36	28.63	10.65	10.83	17.64
Jawa Timur	48.69	52.65	36.81	15.82	16.06	22.87
Kepulauan Bangka Belitung	27.35	30.88	18.87	16.63	15.89	20.93
Sumatera Utara	48.06	45.24	29.20	11.93	13.82	20.12

Sumber : BPS, 2020 (diolah)

Perekonomian daerah dalam hal ini 10 DPP mulai mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif pada Kuartal-II 2020, sebagai akibat dari dampak Pandemi Covid-19. Berdasarkan 10 daerah Destinasi Pariwisata Prioritas, hanya terdapat 2 Provinsi yang tumbuh positif, yakni Sumatera Utara (0,05 persen) dan Maluku Utara (0,46 persen). Sebaliknya, daerah yang mengalami kontraksi paling besar adalah di Provinsi Bangka Belitung (-6,51 persen), Jawa Tengah (-5,94 persen), serta di Jawa Timur (-5,04 persen).

Sektor pariwisata tiap 10 DPP yang ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB pada sektor terkait penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, pada Kuartal-I 2020 tercatat beberapa daerah mengalami pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan penyediaan makan minum negatif, yaitu Nusa Tenggara Timur (-7,81 persen) dan Sulawesi Utara (-17,28 persen). Kemudian, pada Kuartal-II 2020, berlakunya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan adanya kebijakan penutupan akses bandara sementara waktu, menyebabkan masyarakat baik dari dalam negeri maupun luar negeri tidak dapat berpergian ataupun berwisata. Sehingga, pada Kuartal II-2020 seluruh DPP mengalami pertumbuhan negative, dengan pertumbuhan negatif tertinggi ialah Provinsi Nusa Tenggara Barat (-60,26 persen), Sulawesi Utara (-51,07 persen), dan Nusa Tenggara Timur (-41,46 persen).

Penurunan aktivitas ekonomi masyarakat akan menyebabkan krisis sosial yang ditandai dengan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS, beberapa provinsi yang memiliki destinasi pariwisata prioritas mengalami fenomena yang berbeda terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan pada periode sebelum dan saat pandemi Covid-19 berlangsung. Mayoritas provinsi mengalami penurunan tingkat pengangguran terbuka, namun mengalami kenaikan pada tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi tidak signifikan dalam pengurangan tenaga kerja, namun pendapatan masyarakat di provinsi tersebut menurun hingga cenderung rentan miskin. Provinsi-provinsi tersebut adalah Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tenggara. Sebaliknya, terdapat 2 DPP yang mengalami kenaikan TPT pada saat pandemi namun tingkat kemiskinannya mengalami penurunan, yakni Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-

19 pada daerah ini menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja yang signifikan di kedua provinsi tersebut. Provinsi Jawa Tengah merupakan satu-satunya provinsi yang mengalami kenaikan TPT dan tingkat kemiskinan pada saat pandemi Covid-19. Fenomena ini umum terjadi pada saat terjadinya resesi, dimana penurunan pada produksi barang dan jasa yang berkaitan dengan penurunan penyerapan tenaga kerja, dan terdapat pada struktur perekonomian yang bersifat padat karya.

Tabel 2. Kondisi Perekonomian 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Sebelum dan di Masa Covid-19

Provinsi	Perekonomian dan Kondisi Pariwisata Daerah					
	Pertumbuhan PDRB (YoY) (Persen)			Pertumbuhan PDRB Akomodasi dan Makan Minum (YoY)		
	TW IV 2019	TW I 2020	TW II 2020	TW IV 2019	TW I 2020	TW II 2020
Papua Barat	9,00	5,67	1,59	10,61	8,90	-6,33
Maluku Utara	7,61	4,81	0,46	6,02	2,13	-30,32
Sulawesi Tenggara	10,15	6,73	1,19	23,53	5,88	-5,88
Sulawesi Utara	9,33	7,88	2,02	0,83	-17,28	-51,07
Nusa Tenggara Timur (NTT)	7,12	4,33	1,90	1,01	-7,81	-41,46
Nusa Tenggara Barat (NTB)	9,00	5,67	1,59	47,96	23,61	-60,26
Jawa Tengah	7,79	2,61	5,94	12,73	3,98	-19,51
Jawa Timur	6,96	4,22	5,07	6,61	12,21	-17,37
Kepulauan Bangka Belitung	6,05	3,00	6,51	21,02	18,40	2,46
Sumatera Utara	8,53	7,86	0,05	9,70	9,07	-14,01

Sumber: CEIC, 2020 (diolah)

Tabel 3. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas

Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		Tingkat Kemiskinan (%)	
	Sebelum Covid-19	Masa Covid-19	Sebelum Covid-19	Masa Covid-19
	September 2019	Maret 2020	September 2019	Maret 2020
Papua Barat	5,28 Feb	6,20	21,51	21,37
Maluku Utara	4,26	4,97	6,91	6,78
Sulawesi Tenggara	3,59 Agu	3,17	11,04	11,00
Sulawesi Utara	6,25	5,57	7,51	7,62
Nusa Tenggara Timur (NTT)	3,10 Feb	2,80	20,62	20,90
Nusa Tenggara Barat (NTB)	3,42	3,14	13,88	13,97
Jawa Tengah	4,22 Feb	4,25 Feb	10,58	11,41
Jawa Timur	3,92	3,69	10,20	11,09
Kepulauan Bangka Belitung	3,62 Agu	3,41	4,50	4,53
Sumatera Utara	5,41	4,73 Feb	8,63	8,75

Sumber : BPS, 2020 (diolah)

4.3. Kebijakan Pemerintah terkait Pariwisata saat terjadi Pandemi Covid-19

Pemerintah, pada bulan Maret 2020, telah mengeluarkan beberapa kebijakan stimulus ekonomi untuk menciptakan stabilitas pada beberapa sektor dalam perekonomian negara selama masa pandemi Covid-19. Beberapa kebijakan yang diberikan pada sektor pariwisata yakni kebijakan peningkatan kunjungan wisatawan melalui pemberian paket insentif bagi *airline* dan *travel agent* sebesar lebih dari Rp200 miliar untuk menarik kedatangan turis/wisatawan internasional/luar negeri (selain RRT) ke Indonesia, pemberian diskon untuk tiket pesawat penerbangan yang akan menuju atau dari 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) mencapai 50 persen untuk setiap penumpang dengan jumlah sebanyak 25 persen dari total kursi pesawat dengan biaya yang dikeluarkan sekitar Rp490 hingga Rp500 miliar (Kementerian Keuangan, 2020; Paper Indonesia, 2020). Selain itu, terdapat tambahan diskon sebesar 15,8 persen Avtur dari Pertamina dan 5,64 persen diskon tarif penerbangan dari PT. Angkasa Pura Indonesia dan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Airnav Indonesia). Namun, kebijakan stimulus untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ini tidak berdampak signifikan dikarenakan kebijakan tersebut ditetapkan pada akhir februari 2020, sesaat sebelum pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia. Selama pandemi Covid-19 terjadi kekhawatiran dalam berwisata baik di wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara sehingga pemanfaatan stimulus ini tidak berjalan dengan baik.

Kebijakan lain yang dikeluarkan pemerintah selama pandemi Covid-19 adalah insentif fiskal pemerintah dalam rangka menyelamatkan industri dan tenaga kerja pariwisata.

Kebijakan yang dikeluarkan yakni pembebasan pajak hotel dan restoran selama 6 bulan dengan kompensasi Rp3,3 Triliun, (Sugihamretha, 2020), perluasan pembebasan PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk pekerja sektor akomodasi dan restoran, bantuan kartu pra kerja kepada tenaga kerja di Indonesia, termasuk kepada tenaga kerja pariwisata, serta insentif 600 ribu/bulan untuk tenaga kerja yang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan dengan pendapatan di bawah 5 juta rupiah perbulan. Kebijakan dalam rangka menyelamatkan industri pariwisata ini direspon positif oleh beberapa pihak, namun masih terdapat beberapa catatan, dimana bagi industri pariwisata lebih mengharapkan bantuan langsung tunai dari pemerintah, daripada insentif pajak. Hal ini dikarenakan pada faktanya penerimaan dari akomodasi dan makan minum mengalami penurunan yang signifikan pula, sehingga pemberian insentif pajak akan menjadi percuma. Stimulus bantuan pemerintah dalam rangka melindungi tenaga kerja pariwisata sudah efektif, namun belum mampu mampu memberikan kepastian kepada seluruh tenaga kerja sektor pariwisata, dan tidak dapat menjamin lapangan pekerjaan baru saat pasca Covid-19 nanti.

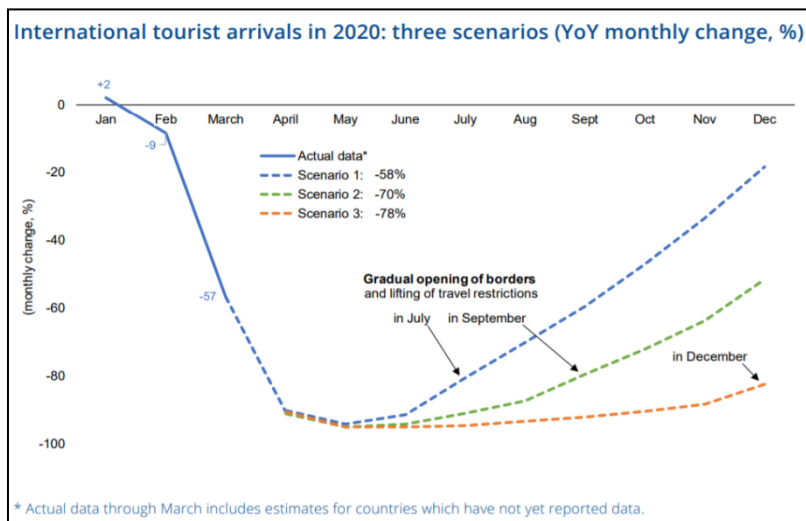
Kebijakan stimulus ekonomi bagi sektor pariwisata sebaiknya secara bersamaan disertai dengan kedisiplinan dalam penerapan protokol pencegahan Covid-19 baik bagi para pengelola industri pariwisata maupun masyarakat di destinasi pariwisata sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para wisatawan untuk berkunjung ke 10 DPP. Protokol kesehatan ini diwujudkan dalam perilaku yang lebih bersih dan lebih sehat secara konsisten setiap hari, melalui masker selama berada di area umum/publik, rutin mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir atau dapat juga menggunakan *hand sanitizer*, mengusahakan menghindari sentuhan bagian tubuh yang terbuka seperti hidung, mata, dan wajah dengan tangan yang belum bersih, dan mempraktikkan jaga jarak fisik setidaknya 1 (satu) meter dengan orang lain di area umum/publik (Kiswanto *et al.*, 2020).

4.4. Kebijakan Pemerintah terkait Paradigma Pariwisata Era New Normal

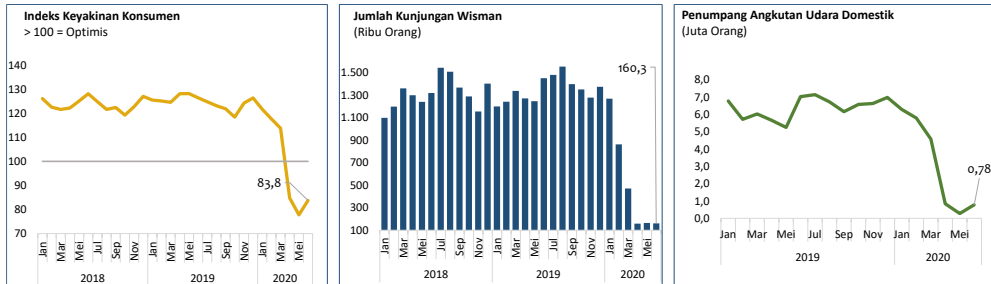
Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada perekonomian Indonesia, khususnya sektor pariwisata, Berdasarkan perhitungan penurunan jumlah kunjungan wisatawan dari UNWTO pada skenario 2 dan skenario 3 (pembukaan aktivitas bepergian pada bulan September dan bulan desember), pariwisata di Indonesia pada akhir 2020 hanya akan mencapai 4-5 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Pasar wisatawan mancanegara diperkirakan baru akan kembali normal secara bertahap mulai 2021, dan kembali normal di tahun 2023. Kontribusi PDB yang bergerak di sektor pariwisata juga akan mengalami pertumbuhan yang negatif pada akhir 2020. Pertumbuhan PDB sektor terkait penyediaan akomodasi serta makan-minum diproyeksikan tumbuh sebesar -5,2% sampai -7,9%, sektor transportasi dan sektor konstruksi masing-masing diproyeksikan tumbuh sebesar -3,1% sampai -7,5% dan 2,2% sampai -0,9%. Beberapa event-event yang dapat mengungkit pariwisata, dimana rencana dilaksanakan pada tahun 2020 mengalami kemunduran hingga waktu yang belum ditentukan, seperti Formula E 2020, Pon 2020, Jogja Marathon, Indonesia Open 2020, dan sebagainya.

Pandemi Covid-19 juga mengubah paradigma pariwisata, dimana (1) atraksi wisata kini harus menerapkan *physical distancing* dan pembatasan kunjungan (*quota*); (2) Airport, Terminal, Stasiun harus menerapkan standar sanitasi yang tinggi; (3) *Product Differentiation* dimana *mass tourism* digantikan dengan *fresh air, adventure, pegunungan, lautan, alam* serta wisata Kesehatan outdoor; (4) *Value Proposition* dimana semula murah dan *overcrowded* menjadi berusia muda, bersih, dan *quality experience*; (5) Fokus pemasaran *Group Travel* dialihkan menjadi *Free Independent Traveler (FIT)*, dan; (6) Hygiene Labelling mutlak untuk diperlukan.

Berdasarkan publikasi *Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) 2019*, indikator kebebasan dan Kesehatan Indonesia mendapatkan poin 4,51, dimana jauh dibawah rata-rata negara di dunia sebesar 5,60 (Calderwood & Soshkin, 2019). Nilai tersebut menempatkan Indonesia dalam peringkat 102 dari 140 negara, Selain itu, indikator keamanan dan keselamatan Indonesia mendapatkan poin 5,37 dan berada pada peringkat 80 dari 140 negara. Kedua indikator ini perlu menjadi catatan serius bagi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia kedepan mengingat arah kebijakan pariwisata pasca Covid-19 ialah berwisata pada destinasi yang dapat memberikan kepastian higienitas, kebersihan dan Kesehatan, disertai dengan keamanan dan keselamatan bagi wisatawan.



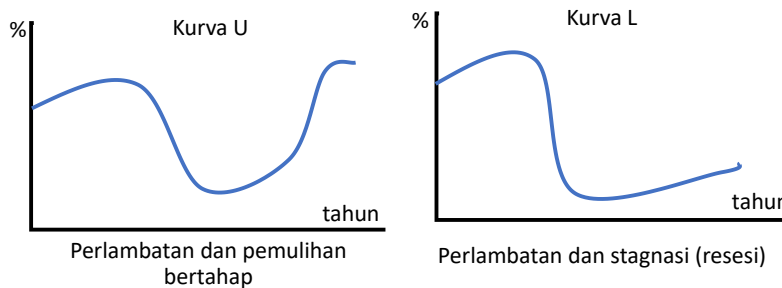
Gambar 5. Potret Trend Penurunan Wisatawan Mancanegara 2020
Sumber: UNWTO (2020)



Gambar 6. Potret Berbagai Indikator Konsumsi di Indonesia yang terkait Pariwisata
Sumber: BPS, BI, OJK, AISI, CEIC (2020)

1.5. Analisis Kebijakan Pariwisata : Perhatian Khusus dan Usulan Kebijakan *Recovery* Pasca Pandemi

Pada era new normal nanti, beberapa pelajaran untuk pariwisata di dunia perlu dipertimbangkan untuk rekomendasi strategi pembangunan pariwisata di Indonesia. Meskipun proses pemulihan akan berbeda di setiap negara, namun terdapat pola umum yang ditemukan, yaitu orang masih mau bepergian meskipun diprediksi secara umum perjalanan domestik akan pulih lebih cepat daripada perjalanan internasional.



Gambar 6. Trend Skenario Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid 2019
Sumber: Sambodo (2020)

Analisis kebijakan dan usulan *recovery* pariwisata pasca pandemi Covid-19 perlu mempertimbangkan hal-hal khusus. Hal hal tersebut antara lain: 1) Negara-negara yang kekurangan pasar wisatawan domestik akan pulih lebih lambat dan mungkin akan membuka pasar bagi wisatawan dari negara-negara terdekat; 2) Wisatawan berusia muda akan bepergian lebih dulu dimana perjalanan masih terbatas pada tujuan terdekat; 3) Dampak ekonomi dari pariwisata akan pulih lebih cepat dimana destinasi luar ruang (*outdoor*) dan yang berhubungan dengan alam akan lebih populer dibandingkan destinasi perkotaan; 4) Untuk menangkap permintaan awal, pelaku industri perjalanan harus memindahkan sumber dayanya secara cepat melalui pemasaran via digital (berbasis internet) dengan mengembangkan proses dan produk yang dimodifikasi; 5) Toko swalayan/retail menerapkan

protokol yang melindungi kesehatan pelanggan dan karyawan serta membantu memulihkan kepercayaan konsumen; 6) Fitur produk, strategi komunikasi, dan kanal pemasaran harus diolah dengan menyesuaikan bauran pelanggan konsumen millennial dan Gen Z yang akan menggantikan generasi *baby boomer*.

Selain disebabkan oleh pandemi Covid-19, terdapat beberapa permasalahan dan kendala mendasar pada sektor pariwisata. Pertama, tren penurunan pengeluaran wisman karena kurang baiknya kualitas produk serta layanan pariwisata. Hal yang kedua adalah terbatasnya aksesibilitas masuk ke Indonesia dan antarwilayah di Indonesia sendiri untuk mendukung perjalanan wisata yang lebih panjang. Hal ketiga lebih terkait pada terbatasnya daya dukung destinasi, seperti keterbatasan pasokan air dan peningkatan tumpukan sampah, serta kesiapan masyarakat sebagai tuan rumah dan pelaku pariwisata yang profesional. Hal keempat adalah mimimnya jumlah SDM yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri pariwisata profesional. Hal kelima adalah masih terbatasnya investasi serta kapasitas industri pariwisata untuk dapat menawarkan atraksi kelas dunia. Keenam, belum optimalnya tata kelola destinasi pariwisata yang juga mendukung kepastian dan kemudahan usaha, serta lingkungan yang berkelanjutan. Hal ketujuh adalah berhubungan dengan keterbatasan *awareness* para pelaku pariwisata terhadap kesiapsiagaan bencana.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian awal, tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis potret pariwisata Indonesia pasca Pandemi Covid-19 dan memberikan rekomendasi *recovery* adaptasi kebijakan ekonomi, baik jangka pendek, maupun jangka menengah dan panjang. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan, perlu disusun usulan kebijakan pariwisata baik permasalahan dan kendala mendasar, serta permasalahan karena pandemi Covid-19 dalam rangka stimulus perekonomian nasional.

4.5.1. Usulan Kebijakan Jangka Pendek

Usulan kebijakan sektor pariwisata dalam rangka *recovery* jangka pendek pasca pandemi Covid-19 dapat dilakukan dalam bentuk: 1) Reorientasi pada pariwisata yang berkualitas, tidak hanya pada *mass tourism*; 2) Pemberian bunga bersubsidi serta restrukturisasi kredit (pinjaman dan *multifinance*) kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bank atau lembaga pembiayaan yang lain, termasuk untuk subsidi/penundaan pajak UKM serta juga tenaga kerja; 3) Insentif rekrutmen, pelatihan sertifikasi dan penempatan tenaga kerja melalui perluasan diklat termasuk bimbingan teknis pembuatan paket layanan *long stay* untuk isolasi mandiri; 4) Fasilitasi Pemerintah Daerah untuk melanjutkan pembangunan 3A (aksesibilitas, amenities dan atraksi) yang terdampak penghentian Dana Alokasi Khusus fisik pariwisata, dengan perhatian khusus pada fasilitasi kebersihan; 5) Percepatan pembangunan infrastruktur di destinasi prioritas; 6) Promosi, pameran dan event pariwisata secara bertahap mulai diaktifkan; 7) Peningkatan insentif pelaku usaha pariwisata, maskapai, agen travel, dan promosi dalam bentuk diskon tiket pesawat dan diskon bahan bakar jet di beberapa bandara destinasi pariwisata prioritas, pemberian insentif bagi *group incentive trip/famtrip* yang dilaksanakan di Indonesia.

4.5.2. Usulan Kebijakan Jangka Menengah

Penanganan jangka menengah sebaiknya dilakukan melalui perbaikan proses dan rantai nilai (*value chain*) dalam aspek pariwisata. Dalam hal ini, strategi kolaborasi Pentaheliks juga wajib menjadi bagian dalam penanganan Covid-19 yang mencakup *Academic, Business, Government, Community/Customer*, dan *Media*. Usulan kebijakan sektor pariwisata dalam rangka *recovery* jangka menengah pasca pandemi Covid-19 dapat dilakukan dalam bentuk: 1) Pemberian diskon wisata bagi pelajar dan mahasiswa, ASN dan TNI/POLRI, tenaga kesehatan dan warga negara usia lanjut (*senior*) serta pemberlakuan cuti dan libur bersama yang mendukung peningkatan wisatawan domestik; 2) Pemasaran ke originasi yang dekat dan yang sudah lebih dahulu pulih; 3) Peningkatan insentif bagi pelaku usaha pariwisata, maskapai, agen travel, dan promosi dalam bentuk diskon tiket pesawat, parkir pesawat dan diskon bahan bakar jet di beberapa bandara destinasi pariwisata prioritas, pemberian insentif bagi *group incentive trip/famtrip* yang dilaksanakan di Indonesia, promosi melalui *influencer*; 4) Bekerja sama dengan maskapai untuk pemulihan dan penambahan jadwal penerbangan; 5) Penyelenggaraan event internasional seperti olah raga, seni dan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*), termasuk kesuksesan penyelenggaraan Moto GP, Piala Dunia U-20, dan lain-lain. Promosi wisata Indonesia ke dunia internasional ini harus dilengkapi dengan hal yang mampu menunjukkan peningkatan standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan pengunjung di Indonesia; 6) Peningkatan infrastruktur 3A (amenitas, aksesibilitas, dan atraksi) di destinasi pariwisata baik melalui APBN, Dana transfer, APBD, BUMN, swasta maupun KPBU; 7) Insentif rekrutmen, pelatihan, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja melalui perluasan diklat 3-in-1 untuk sebanyak 100.000 tenaga kerja; 8) Kerja sama pelatihan dan magang bagi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk bimbingan teknis peningkatan standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan, terutama untuk pelaku UMKM; 9) Peningkatan *bidding* penyelenggaraan MICE internasional di Indonesia; 10) Pengawasan realisasi investasi pariwisata skala besar; 11) Peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha pariwisata dan pelaku kreatif baik ke perbankan maupun ke nonperbankan.

4.5.3. Usulan Kebijakan Jangka Panjang

Penanganan jangka panjang sebaiknya dilakukan melalui pembangunan sistem operasi industri pariwisata. Pembuatan sistem operasi industri pariwisata sebagai penanganan jangka panjang harus disiapkan. Keberhasilan sektor pariwisata adalah ketika ada hal yang bisa dilihat, ada kegiatan yang bisa dilakukan oleh wisatawan di lokasi destinasi wisata. Usulan kebijakan sektor pariwisata dalam rangka *recovery* jangka panjang pasca pandemi Covid-19 dapat dilakukan dalam bentuk: 1) Penguatan *supply side*; 2) Penguatan Atraksi; 3) Penguatan Akses; dan 4) Penguatan *demand side*.

Penguatan *supply side* sebaiknya dilakukan melalui intervensi kebijakan standardisasi terkait pelayanan rumah tangga termasuk yang berhubungan dengan penyediaan

akomodasi serta makan-minum. Selain itu, juga perlu ditetapkan kurikulum sekolah kepariwisataan siap kerja sejak awal semester. Berbagai kemudahan fasilitas penunjang ekonomi perlu segera dieksekusi untuk sektor pariwisata seperti *tax holiday* dalam rangka investasi pada sektor pariwisata, fasilitas kredit ekspor untuk para pelaku pariwisata (terkait ekspor jasa), serta tarif listrik (energi) yang dikhususkan saat di luar waktu beban puncak untuk para pelaku usaha pariwisata.

Penguatan atraksi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dapat dilakukan melalui keanekaragaman jenis wisata seperti wisata budaya, pendidikan, olahraga, kesehatan, sejarah, dan lain lain. Diversifikasi atraksi wisata juga perlu dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/lokasi wisata. Dalam hubungannya dengan penguatan akses, hal yang perlu dilakukan adalah: 1) Perbaikan keterhubungan antar moda transportasi dalam rangka mengimbangi pembangunan infrastruktur fisik; 2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka harmonisasi informasi agenda pariwisata di seluruh wilayah; serta 3) Mensinergikan kalender wisata dengan lebih baik. Penguatan *demand side* sebaiknya dilakukan melalui optimalisasi potensi wisatawan dalam negeri, kartu wisata untuk pelajar dan juga warga usia lanjut serta kartu diskon pariwisata untuk masyarakat umum.

V. Kesimpulan

Sebelum adanya pandemi, fokus pembangunan pariwisata pada upaya dukungan peningkatan penguatan destinasi pariwisata prioritas (DPP) dan revitalisasi Destinasi Bali dengan tujuan untuk menjaring devisa sebanyak-banyaknya melalui peningkatan *mass tourism*. Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi ruang gerak masyarakat dunia adalah bencana bagi sektor pariwisata, termasuk Indonesia. Pembangunan pariwisata dipaksa untuk beradaptasi dengan pandemi yang diterjemahkan pemerintah Indonesia dalam bentuk kebijakan new normal. Upaya saat ini tidak hanya terkait penanganan bencana, tetapi juga mengkaji ulang perencanaan nasional dan daerah untuk sektor pariwisata. Potret pariwisata saat ini digambarkan sebagai kondisi yang memerlukan penanganan khusus dan *extra-ordinary*. Pariwisata di Indonesia pada akhir 2020 diprediksi oleh berbagai ahli bahwa hanya akan mencapai 4-5 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Pasar wisatawan mancanegara diperkirakan baru akan kembali normal secara bertahap mulai 2021, dan kembali normal di tahun 2023. Sebenarnya sejak bulan Maret 2020, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan stimulus ekonomi untuk menciptakan stabilitas pada beberapa sektor dalam perekonomian negara selama masa pandemi Covid-19, namun hasilnya tidak sesuai yang diharapkan.

Tulisan ini memberikan usulan kebijakan khusus pada sektor pariwisata, baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Usulan ini didasarkan pada tinjauan pustaka tentang potret pariwisata sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, termasuk tidak efektifnya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Hasil analisis merekomendasikan bahwa kaji ulang perencanaan pembangunan pariwisata ditekankan

pada stimulus umum, stimulus UMKM (*Micro, Small and Medium Enterprises*), penataan paket akomodasi, transportasi dan akses, stimulus perpajakan, bimbingan teknis, penguatan diversifikasi wisata, serta penguatan *demand* dan *supply side* pariwisata. Pemerintah perlu meningkatkan strategi kolaborasi Pentahelik yang lebih optimal dalam penanganan Covid-19 yang mencakup *Academic, Bussiness, Government, Community/ Customer, dan Media*

Daftar Pustaka

- Smith, Adam. (1776). *"An Inquiry into the Nature of Causes of the Wealth of Nations"* dalam *Mark Skusen (2005); Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern*. Jakarta : Prenada.
- Becker, E. (2020). *How Hard Will the Coronavirus Hit The Travel Industry?.* Dipublikasikan pada 2 April 2020, diunduh dari <https://www.nationalgeographic.com/travel/2020/04/>
- BPS. (2020a). *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Agustus 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- BPS. (2020b). *Sosial Demografi Dampak Covid-19*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Calderwood, L.U. & Soshkin, M. (2019). *The Travel & Tourism Competitiveness Report (2019)*. ISBN-13: 978-2-940631-01-8. Geneva: World Economic Forum's Platform for Shaping the Future of Mobility
- CEIC.(2020). *Indonesia Premium Database*. Diunduh 15 September 2020 dari website <https://insights.ceicdata.com/node/INDONESIA>
- IMF. (2020). *World Economic Outlook Database (April 2020)*. Washington D.C: International Monetary Fund (IMF)
- Kementerian Keuangan. (2020). *Pemerintah Komunikasikan Kebijakan Fiskal Paket Wisata untuk Antisipasi Dampak Negatif Virus Corona*. Diunduh 23 Agustus 2020, dari website <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/>
- Keynes, J. M. (2018). *E-Book: The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Publisher: Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-3-319-70344-2 .
- Kim, J., Lee, C.-K., & Mjelde, J. W. (2016). *Impact of Economic Policy on International Tourism Demand: The Case of Abenomics*. *Current Issues in Tourism*, 1–18. doi:10.1080/13683500.2016.1198307
- Kiswanto, A., Rohman, H., & Susanto, D.R. (2020). *Penyaluran Alat Pencegahan dan Sosialisasi Protokol Kesehatan untuk Pelayanan Kunjungan Wisatawan dalam Menghadapi New Normal Pasca Pandemi Covid-19*. *Jurnal Abdimas Pariwisata*, 1(2), 38-51. DOI: <https://doi.org/10.36276/jap.342>
- Lew, A. A. (2014). *Scale, Change and Resilience in Community Tourism Planning*. *Tourism Geographies*, 16(1), 14–22. <https://doi.org/10.1080/14616688.2013.864325>

- Mankiw, N. G. (2013). *Macroeconomics Eight Edition*. New York (US): Worth Publisher, Harvard University.
- Mankiw, N. G. (2009). *Macroeconomics Seventh Edition*. New York (US): Worth Publisher, Harvard University.
- Mathieson, A & Wall, G. (1982). *Tourism Economy Physical and Social Impact*. New York. Longman Group
- Mishkin, F.S. (2010). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets 9th*. New Jersey: Pearson
- Paper Indonesia. (2020). *Atasi Dampak Corona, Pemerintah Terapkan Kebijakan Fiskal*. Retrieved August 23st, 2020, from <https://www.paper.id/blog/bisnis/kebijakan-fiskal/>
- Salvatore, D. (1996). *Ekonomi Internasional (International Economic)*. Jakarta: Erlangga.
- Sambodo, L.A.A.T. (2020). *Pariwisata dan Adaptasi Tatanan Baru (Paparan Bappenas)*. Disampaikan dalam Webinar Genpinas. 19 Juni 2020.
- Setiawan, Heru. (2018). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Kinerja Makroekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Terapan*. Desember 2018; 03(2): 23-43 ISSN 2541-1470
- Sugihamretha, I.D.G. (2020). Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 191-206. <https://journal.bappenas.go.id/index.php/jpp/article/download/113/85/>
- Surjaningsih N, Utari, D.A, & Trisnanto, B. (2012). *Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Output dan Inflasi*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia
- Todaro, M.P & Smith, S.C. (2006). *Pembangunan Ekonomi Edisi ke-9 (Economic Development 9th Edition)*. Jakarta: Erlangga
- UNWTO. (2020). UNWTO Report 2020. Dikutip dari <https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020> pada tanggal 14 September 2020 Pkl. 06.16WIB